



MENANTI 'JUMAT KERAMAT' FIRLI

Polisi bakal memeriksa eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat (1/12/2023). Apakah akan ada penahanan? Mengingat istilah 'Jumat Keramat' pernah menjadi momok menakutkan bagi koruptor. Sebab sejak tahun 2012, komisi anti-rasuah seringkali menangkap, menetapkan tersangka serta menahan para pelaku korupsi di hari tersebut. Sebelum memeriksa Firli, Polda Metro Jaya dan KPK sudah berkoordinasi untuk mendengarkan kesaksian mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL)-- yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan pencucian uang di Kementan pada Rabu (29/11/2023) hari ini. Tak sendiri, SYL akan diperiksa bersama dua anak buahnya, Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, akhirnya KPK yang saat ini sementara dipimpin Nawawi Pomolango sepakat memutuskan tidak memberi bantuan hukum terhadap Firli.

(Baca Hal 11)

FIRLI BAHURI

TAHANAN



ALBERTINA HO

- Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 1985, Albertina telah memiliki pengalaman panjang sebagai hakim di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia.

- Dikutip dari laman resmi KPK, kariernya melibatkan tugas mulai dari Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Dewan Pengawas KPK pada Desember 2019.



SYAMSUDDIN HARIS

Syamsuddin Haris, seorang profesor riset di bidang Perkembangan Politik Indonesia, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 9 Oktober 1957. Dengan pengalaman sebagai peneliti, dosen, dan ketua forum ilmu politik, Prof. Haris membawa latar belakang akademis yang kuat ke Dewan Pengawas KPK. Selain memiliki kontribusi dalam penelitian dan penguatan ilmu politik, Prof. Haris juga menerima penghargaan, termasuk Satyalencana Pembangunan.



HARJONO

Harjono, lahir pada 31 Maret 1948, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Karirnya melibatkan peran sebagai anggota MPR, hakim konstitusi, dan anggota DKPP. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman di lembaga legislatif dan yudikatif, Harjono membawa beragam pengalaman ke Dewan Pengawas KPK.

POLITICA (Hal.3)

**Dana Desa
Rp 335 T Dikritisi,
DPR Tuding Tak Ada
Pembangunan
Signifikan**



**TUMPAK HATORANGAN
PANGGABEAN (KETUA)**

- Tumpak Hatorangan Panggabean lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Ia lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada 1973. Kariernya melibatkan berbagai jabatan di Kejaksaan RI, dan pernah menjadi Pimpinan KPK periode pertama (2003-2007).

- Tumpak juga memiliki pengalaman di sektor BUMN, menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia dan Komisaris Utama PT Pelindo 2. Pengabdianya diakui dengan penghargaan, termasuk Satya Lencana Karya Satya.



**INDRIYANTO
SENO ADJI**

- Meraih gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada 1982, Indriyanto Seno Adji lahir di Jakarta, 11 November 1957.

- Setelah studinya di UI, ia kemudian melanjutkan ke Magister Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum di bidang Kekhususan Pidana di Universitas yang sama. Sebagai mantan Plt. Wakil Ketua KPK dan kini Anggota Dewan Pengawas, Indriyanto juga merupakan seorang profesor dan konsultan ahli di bidang hukum.

**KEMANA
DEWAS KPK?**

Aturan Baru Presiden Jokowi Pengemplang Cukai Bisa Bebas Bui Asal Bayar 4 Kali Lipat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dari beleid ini penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai bisa dilakukan oleh pejabat setingkat menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, penghentian penyidikan dilakukan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan," tulis Pasal 2 Ayat (1), dikutip Selasa (28/11/2023). Untuk diketahui, aturan ini diundangkan pada 22 November 2023.

Namun penghentian penyidikan hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nantinya yang bersangkutan harus membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu dalam proses penyidikan, penyidik dapat memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.

Adapun menurut pasal 4, menteri atau pejabat yang ditunjuk juga melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar dan besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar. "Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk," katanya.

Dari penjelasan umum, dijelaskan mayoritas pelanggaran di bidang cukai merupakan tindak pidana yang diselesaikan melalui proses penyidikan. Namun dalam proses penyidikan, belum memberikan efek jera bagi pelaku dan penerimaan negara dari pidana denda sangat kecil karena terpidana memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Sementara filosofi cukai



(Ilustrasi) Barang bukti rokok tanpa cukai dimusnahkan.(dok.ant)

merupakan instrumen fiskal dan salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan maka sanksi administrasi berupa denda dipandang akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan sanksi pidana.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pun memberikan penjelasan. Dia mengatakan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurutnya, hal itu selaras dengan yang berlaku di Undang-undang Perpajakan dengan prinsip ultimum remedium. Ultimum remedium berarti penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum.

"Ini selaras dengan yang berlaku di UU Perpajakan, prinsip ultimum remedium. Pajak dan cukai adalah instrumen untuk penerimaan negara, maka karakteristiknya mengutamakan penerimaan. Bagi wajib pajak atau pengusaha yang melakukan pidana dan merugikan penerimaan negara, dapat membayar kewajiban terutang plus denda dan tidak dituntut pidana," jelasnya, Selasa (28/11/2023).

Dia menerangkan, hal tersebut sudah berlaku lama di Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sementara, untuk cukai baru diatur di UU Nomor 7 Tahun 2021. "Di UU KUP sudah lama berlaku diatur Pasal 44B, sejak 1984. Nah di cukai baru diatur UU 7/2021," katanya.

"Karakteristik UU Perpajakan sejak 1983 adalah administrative penal law. UU administrasi yang diperkuat sanksi pidana. Maka sifat pidana di UU Perpajakan adalah ultimum remedium," tambahnya.

Realisasi Cukai Rendah

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan cukai hingga Oktober 2023 baru mencapai Rp 169,77 triliun. Realisasi ini baru mencapai

69,17% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 245,45 triliun. Pos penerimaan ini juga turun 4,14% secara tahunan yang disumbang oleh penurunan pada hasil tembakau (HT) dan Etil Alkohol (EA).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan, penerimaan cukai pada tahun ini tidak akan mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang masih lemah, serta maraknya fenomena downtrading dan peredaran rokok ilegal.

"Berat lah, berat (mencapai target), daya beli masyarakat lagi lemah," ujar Tauhid, Selasa (28/11/2023).

Tauhid bilang, peningkatan tarif cukai tembakau akan berdampak kepada peningkatan harga produk tembakau, khususnya rokok. Oleh karena itu, peningkatan harga ini juga diikuti oleh peralihan konsumsi dari rokok golongan yang mahal ke rokok golongan di bawahnya yang lebih murah.

Peralihan konsumsi tersebut berimbas pada penurunan jumlah produksi rokok golongan I, utamanya sigaret kretek mesin (SKM) maupun sigaret putih mesin (SPM) yang cukainya lebih tinggi. "Hipotesa saya adalah orang yang merokok itu gak akan berkurang, yang terjadi adalah mereka pindah golongan, dari golongan III pindah ke rokok ilegal atau rokok tanpa cukai. Sementara golongan I dan II bisa saja pindah ke rokok elektrik," jelasnya.

Meski cukai berperan sebagai suatu alat untuk mengendalikannya konsumsi terhadap suatu barang yang memiliki efek negatif, namun menurut Tauhid, bukan berarti penerimaan negara juga ikut turun. "Penerimaan negara kan harus jalan, paling bagus penerimaan naik, jumlah dari batang rokok yang dikonsumsi turun. Ini kan jumlahnya turun, penerimaannya juga ikut turun. Berarti gak sesuai dengan perkiraan," terang Tauhid.

Untuk itu, Tauhid menyarankan pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan tarif cukai rokok pada 2024 lantaran bisa berdampak kepada daya beli masyarakat dan juga penerimaan. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu segera menerapkan ekstensifikasi cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBKD) pada tahun depan.

Berbeda, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meyakini bahwa target penerimaan cukai pada tahun ini masih bisa tercapai dalam sisa dua bulan terakhir ini, terutama ditopang oleh penerimaan cukai rokok atau CHT.

"Kalau dilihat dari mekanismenya di mana pembelian cukai bisa dilakukan di muka oleh industri rokok, saya kira akan ada kenaikan penerimaan cukai pada dua bulan terakhir nanti," kata Piter. (wid,ktn,ist/dya)

REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAM CUKAI (TRILIUN RUPIAH)

Jenis Penerima	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y,%)		(% Capaian)
		2022	2023	2022	2023	
BEA MASUK	47.53	40.68	41.41	31.93%	1.80%	87.13%
CUKAI	245.45	177.11	169.77	19.00%	-4.14%	69.17%
Hasil Tembakau	232.59	170.67	163.24	18.69%	-4.35%	70.19%
Etil Alkohol	0.14	0.10	0.10	13.44%	-3.71%	73.35%
MMEA	8.67	6.28	6.32	29.31%	0.66%	72.91%
Denda Adm. Cukai	-	0.04	0.09	-41.23%	136.51%	-
Cukai Lainnya	-	0.02	0.02	-2.97%	-23.92%	-
Plastik & MBKD	4.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
BEA KELUAR	10.21	37.82	9.67	44.80%	-74.43%	94.71%
TOTAL	303.19	255.61	220.85	24.22%	-13.60%	72.84%
PPN Impor		219.92	208.00	46.98%	-5.41%	
PPn BM Impor		4.01	5.57	45.54%	38.73%	
Pph Pasal 22 Impor		62.01	57.82	107.42%	-6.77%	
Total PDRI Lainnya		285.94	271.38	56.87%	-5.09%	
TOTAL DJBC +PERPAJAKAN		541.55	492.23	39.55%	-9.11%	

Dana Desa Rp 335 T Dikritisi, DPR Tuding Tak Ada Pembangunan Signifikan

JAKARTA - Dalam hitungan kasar, selama 5 tahun terakhir ada sedikitnya Rp 335 T dana desa yang telah digelontorkan pemerintah. Sayangnya, menurut DPR RI tak ada pembangunan signifikan yang tampak.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mempertanyakan hasil dana desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja, Selasa (28/11/2023).

Ridwan menghitung, bila rata-rata dana desa tiap tahun digelontorkan pemerintah Rp 71 triliun, maka uang yang diguyur untuk pembangunan di desa-desa selama 5 tahun terakhir sangat besar. "Seperti yang disampaikan Pak Hamka tadi, Rp 71 triliun. Kalau 5 tahun berarti Rp 355 triliun. Itu cukup besar itu. Sebenarnya itu desa kita sekarang sudah maju, kalau itu terkeloa dengan baik. Tapi banyak hambatan yang ada, itu perlu perhatian," kata Ridwan saat Raker Komisi V di DPR, Selasa (28/11/2023).

Alih-alih dapat melihat hasil setimpal dengan besarnya dana desa, dalam praktik pencairan dana desa Ridwan melihat masih banyak masalah. Politikus Golkar itu bahkan menyinggung adanya pungutan liar demi muluskan pencairan dana desa. "Pengamatan kita di lapangan memang banyak bocoran yang ada, misal mereka kalau mau urus pencairan dana, konon kabarnya, kita tidak boleh menuduh, konon kabarnya mereka harus ada setoran kepada BPPMD," kata Ridwan.

Meski demikian, kata Ridwan, konsep alur administrasi itu perlu dipelajari dulu. Masalah lain, adalah SDM kepala desa yang kurang, ini juga jadi celah adanya pungutan liar dengan dalih memperlancar birokrasi. "Tapi memang serba salah, mereka tidak punya kemampuan apa-

apa. Para kades tidak mampu menyelesaikan persoalan bagaimana tata cara pelaporan. Dibuatkan laporan dan dipungutlah biaya dan seterusnya. Kalau enggak dikasih biaya enggak cair uangnya," tegas dia.

Dari hasil pantauan dia, sebanyak Rp 335 triliun dana desa yang dia taksir selama 5 tahun belakang nyatanya tidak signifikan terlihat pada hasil pembangunan desa. "Belum lagi permainan di lapangan, masa uang Rp 355 triliun itu desa kita masih seperti itu adanya. Kita turun ke desa masih biasa-biasa saja, kalau ada perubahan itu kecil-kecilan saja, kalau ada jalan desa yang kecil-kecil, kalau di pulau ada paving-paving block," pungkasnya.

Mendes Menyangkal

Sesuai rapat, Mendes PDTT Abdul Halim menyangkal bahwa Dana Desa belum memberikan dampak terhadap pembangunan Desa. Menurut dia, apabila diamati lebih seksama perkembangan di desa-desa Indonesia cukup signifikan. "Sebenarnya kalau diukur dari kondisi sebelumnya, sebenarnya sangat signifikan," kata dia.

Selain itu, kata dia, progres pembangunan desa di Indonesia juga bisa dibandingkan dengan negara lain di Asean. Dia bilang Dana Desa di Indonesia adalah yang paling besar dibandingkan negara Asean lainnya. "Kita punya namanya Asean Village Network, jadi desa desa Asean kita bangun jejaring. Itu dana desanya yang paling besar Indonesia, Indonesia bisa cerita banyak, mereka pada bengong," kata dia.



Suasana rapat kerja bersama antara Komisi V DPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2023). (ant)

Dia optimis penambahan dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun bisa digunakan untuk pembangunan desa yang lebih bagus. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar tiap tahun desa diberi dana Rp 5 miliar. Dana desa tersebut jadi salah satu yang masih dibahas dalam revisi UU Desa.

"Pasti (pembangunan desa) lebih bagus, karena pada intinya dua hal yang harus menjadi prioritas pembangunan ke depan itu. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM," kata Abdul Halim. "Jadi dua hal itu sangat mendasar. Dan hampir semua negara bicara itu. Indonesia juga bicara itu, cuma kita garap mulai dari basis desa," sambung dia.

Abdul mengatakan bila dana desa ditambah, perlu diikuti dengan penambahan kewenangan desa yang

saat ini sifatnya masih terbatas. Abdul memberi contoh, saat ini honorarium kepala desa dan perangkat desa masih diambil dari alokasi dana desa dari APBD, yang ditransfer dari APBN.

"Ke depan, dengan dinaikannya dana desa maka paket honorarium masuk di dalam dana desa. Tapi kewenangan desa ditambah," kata dia.

Contoh penambahan wewenang desa adalah mengelola dana sosial, dia mengusulkan nantinya penyaluran bantuan pangan non tunai bisa melalui desa sehingga putaran uang di desa menjadi lebih besar. "Berarti kewenangan desa ditambah juga, dana desa ditambah. Jadi harus ada perkembangan secara linier ketika penambahan dana desa dilakukan maka harus ada penambahan kewenangan desa. Karena kalau enggak, stuck. Malah bingung memanfaatkannya," pungkasnya. (wid,rls,ist/dya)

Uraian	2022		2023		%
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Dana Desa	68.00 T	57.98	70.00 T	58.34	83.35

Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa:

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai periode ini telah disalurkan ke rekening kas desa Rp8,52 triliun kepada 2,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 74.918 desa.
- Dana Desa 2023 ditentukan untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa

Pemkot Surabaya Akan Terapkan Jumat Berbahasa Inggris di SMP Negeri

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan memprogramkan penggunaan Bahasa Inggris satu hari penuh pada seluruh SMP Negeri di Surabaya.

Pernyataan tersebut diucapkan Wali Kota Eri saat menjadi Keynot Speech Forum Group Discussion “Menatap Surabaya 5 Tahun Ke Depan” & Coaching Clinic “Literasi Digital dan Stop Bullying” yang dihadiri oleh perwakilan siswa SMP di Surabaya, Selasa (28/11/2023) di Balai Budaya Surabaya.

Program sehari berbahasa Inggris tersebut direncanakan akan dilakukan setiap hari Jumat saat sedang istirahat. Program ini diadakan karena Eri mengaku tak mau ketinggalan dengan Kota-kota lain yang memiliki program serupa. Meski begitu, beberapa SMP di Surabaya kini telah menerapkan program berbahasa Inggris meski program ini belum dimulai.

“Ini luar biasa, karena anak-anak sudah menyadari bagaimana dia nanti dewasa, maka dia harus bertarung secara internasional. Bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Maka hari ini mereka harus



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ditemui usai acara. (Jannatul Firdaus/Lenteratoday)

memahami itu. Dan saya bangga betul ketika itu keluar dari lisannya, dari mulutnya anak-anak SMP. Ini sangat membanggakan buat saya,” ungkap Eri.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh. Ia mengatakan bahwa telah berkoordinasi bersama para kepala sekolah dan juga guru mengenai program ini. Nampaknya, program itu mendapat respon baik, dan siswa memiliki keinginan untuk

mendapatkan program itu.

“Kan ini kan saling mengisi. Harapan kami nanti tahun ajaran baru paling lambat. Segera lah, ini kan hal yang baik ya,” ujar Yusuf.

Yusuf mengungkapkan, hari Jumat dipilih untuk menerapkan program tersebut karena anak akan lebih leluasa untuk berkomunikasi antar teman. Mengingat, hari Jumat merupakan hari minat bakat karena adanya ekstrakurikuler, dan lebih sedikit digunakan mata pelajaran

akademis.

“Nah ini dampaknya nanti kan anak-anak senang. Senangnya itu ada kosa kata akan bertambah terus. Semakin dipakai, semakin digunakan untuk komunikasi, kosa kata akan semakin bertambah. Kan kalau sudah dilakukan paham kan,” ungkap Yusuf.

Meski begitu, untuk melatih Bahasa Inggris pada siswa, program berbahasa Inggris dilakukan tak harus menggunakan grammer. Karena mempelajari grammer membutuhkan waktu, dan ditakutkan program ini tak kunjung berjalan.

“Ya nanti anak jalan ngomong misalnya good morning, itu. Kan sudah mulai. Yawes nggak usah grammer, nanti kan akan tertata sendiri,” ujar Yusuf.

Program ini akan dijalankan bagi siswa SMP Negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya. Belum menjajak ke SD, karena SD masih menerapkan materi tematik, dan belum wajib bidang studi. Maka nantinya diharapkan program ini bisa memotivasi siswa SD untuk juga bisa belajar berbicara bahasa Inggris, dan dapat mengimplementasikan program berbahasa Inggris saat SMP. (jan/lut)

Empat Kuliner Khas Banyuwangi Tercatat dalam KIK

BANYUWANGI – Empat kuliner khas Banyuwangi, Jawa Timur, resmi mendapat surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Empat kuliner tersebut adalah sego cawuk, sego tempong, pecel pitik, dan ayam kesrut. Empat kuliner tersebut secara resmi tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional (PT) asli Bumi Blambangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah menyampaikan surat pencatatan inventarisasi KIK pengetahuan tradisional tersebut kepada Pemkab Banyuwangi pada Senin (27/11/2023).

“Ini cukup menggembirakan, empat makanan khas Banyuwangi, sego cawuk, sego tempong, pecel pitik, dan ayam kesrut secara hukum sudah

jelas makanan ini berasal dari Banyuwangi, Bumi Blambangan kita tercinta,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (28/11/2023).

Ipuk menjelaskan, keberadaan KIK adalah cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia, termasuk kepemilikan KIK dan mencegah pihak asing untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia.

Ipuk menyebut, tahun ini ada 9 kuliner tradisional asli Banyuwangi yang diajukan ke Kemenkumham. Dari total tersebut, 4 kuliner telah berhasil, sementara 5 lainnya masih dalam proses. Yaitu pecel rawon, rujak soto, tahu walik, bagiak, dan pindang koyong.

“Semoga semuanya segera clear, dan kita segera mendapatkan kepastian hukum untuk lima kuliner

tersebut. Ini adalah salah satu upaya untuk menjaga warisan leluhur,” tegas Ipuk.

Ipuk menambahkan, selain pengajuan kekayaan intelektual komunal (kelompok), pihaknya juga mendorong masyarakat agar mendaftarkan hak cipta atas karya intelektual pribadinya (KIP).

Dengan mendaftarkan KIP, kata Ipuk, masyarakat tak hanya mendapatkan jaminan hukum atas karya mereka, melainkan juga jaminan ekonomi. Karena sertifikat KIP bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk mengakses pendanaan.

“Sosialisasi terus dilakukan agar pelaku UMKM maupun masyarakat umum sadar untuk mendaftarkan hak cipta atas karya mereka. Pemkab juga memberikan fasilitasi bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan kepada Kemenkumham. Prosesnya

juga akan didampingi,” kata Ipuk.

Saat ini, total pengurusan hak kekayaan intelektual yang telah difasilitasi pemkab sebanyak 144, terdiri atas pengurusan merk dagang.

Untuk menjaga tradisi dan budaya leluhur, Pemkab Banyuwangi juga rutin menggelar sejumlah agenda. Salah satunya Festival Banyuwangi Kuliner yang konsisten mengangkat masakan khas daerah. Sebut saja pecel rawon, ayam pedas, pecel pitik, sego tempong, hingga ayam kesrut juga pernah ditampilkan dalam ajang tahunan tersebut.

“Ini adalah cara menjaga dan melestarikan makanan tradisional kita. Kita harus bertanggung jawab menjaga kekayaan warisan resep para leluhur kita. Kuliner adalah kekayaan budaya nusantara, sayang kalau harus punah,” pungkasnya. (mok)



Sego Cawuk



Sego Tempong



Pecel Pitik



Ayam Kesrut

Smelter PT Freeport Indonesia Diprediksi Beroperasi Pertengahan 2024

GRESIK - Progres proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan Java Integrated Industrial Port and Estate (JIPE) Manyar Gresik, masih tetap sesuai schedule. Perusahaan smelter terbesar di dunia itu, akan melakukan tes commissioning awal tahun 2024, sebelum beroperasi secara bertahap di kuarter pertama tahun depan.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, progres smelter saat ini diperkirakan mencapai 83 persen. PTFI terus menyelesaikan beberapa pekerjaan guna penyelesaian konstruksi fisik pada akhir Desember 2023.

"Awal tahun 2024 kami akan melakukan pre-commissioning dan commissioning untuk memastikan seluruh peralatan dan fasilitas berfungsi," katanya, Selasa (28/11/2023).

Masih menurut Tony Wenas, dirinya optimistis proyek pembangunan smelter akan selesai sesuai jadwal. Dalam pembangunan smelter kedua ini, PTFI menanamkan investasi USD 2,9 miliar, atau setara Rp 43 triliun per akhir Oktober 2023, dari total anggaran US\$3 miliar.

"Harapan kami relaksasi ekspor konsentrat tembaga dapat terus diberikan sampai smelter tersebut beroperasi penuh," ujarnya.

Setelah beroperasi penuh lanjut dia, smelter mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton (dmt) dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600 ribu ton per tahun untuk mendukung program hilirisasi nasional.

Progres smelter saat ini diperkirakan mencapai 83%. PTFI terus menyelesaikan beberapa pekerjaan guna penyelesaian konstruksi fisik pada akhir Desember 2023," ujar Tony.

Tony menambahkan, pada awal 2024, Freeport akan melakukan, pre-commissioning dan commissioning untuk memastikan seluruh peralatan dan fasilitas berfungsi. "Kami optimistis proyek pembangunan smelter akan selesai sesuai jadwal," jelasnya.

Tony mengatakan, dalam pembangunan smelter kedua ini, PTFI menanamkan investasi USD 2,9 miliar atau setara Rp 43 triliun per akhir Oktober 2023, dari total anggaran USD 3 miliar. "Harapan kami relaksasi ekspor konsentrat tembaga dapat terus diberikan sampai smelter tersebut beroperasi penuh," lanjutnya.

Setelah beroperasi penuh, sambung Tony, smelter mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton (dmt) dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

"Nantinya, kedua fasilitas smelter

ini adalah komitmen dan keseriusan PTFI dalam mendukung program hilirisasi nasional. PTFI dan pemerintah Indonesia terus bahu membahu agar kedua smelter dapat memberi manfaat maksimal bagi semua pihak," tukas Tony.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat berkunjung ke proyek smelter di Gresik menyatakan pihaknya siap mendukung kebutuhan operasi PTFI di Gresik. "Kami berikan dukungan yang diperlukan, termasuk perpanjangan untuk peraturan izin ekspor (tembaga)," paparnya.

Dirinya juga mengapresiasi perkembangan pembangunan smelter kedua PTFI yang diharapkan segera beroperasi penuh sehingga mampu mendorong peningkatan per-tumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar smelter.

"Saya senang melihat perkembangan pembangunan smelter sudah mencapai 80% lebih. Saya kira ini membanggakan karena dipimpin anak-anak negeri. Konsentrat tembaga dikelola di sini secara bertahap dan kita punya saham mayoritas," pungkasnya.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membidik peluang pemanfaatan gas bumi yang diproduksi di Jawa Timur. Salah satunya menasar untuk penggunaan di smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Mengingat, produksi gas bumi di wilayah ini yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penyerapan dari industri-industri di sekitar. Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) Nurwahidi membuka kemungkinan suplai gas bumi lewat jaringan yang ada.

"Kalau dari Gresik kita bisa suplai dari (Jawa) Timur menggunakan gas pipa, bukan LNG, karena itu dekat dengan jalur pipa utama transmisi yang ada di wilayah Jawa Timur," kata dia, ditemui di Fasilitas Produksi PGN Saka, Gresik, Jawa Timur, ditulis Selasa (28/11/2023).

Kendati begitu, Nurwahidi belum bisa memastikan sumber penyuplai gas ke Smelter Gresik itu. Namun, dia mengungkapkan kesiapan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jawa Timur siap memasok ke Smelter Gresik milik Freeport jika diperlukan.

"Jujur aja secara komersialisasi saya belum tahu mendapat alokasi darimana yang smelter itu. Tapi tentu



Foto Mendag Zulkifli Hasan (kiri) didampingi Presdir PTFI Tony Wenas saat berkunjung ke proyek pembangunan smelter di JIPE Gresik. (foto: beritajatim.com)

karena gas kita cukup banyak, mereka akan bisa mendapatkan suplai dari wilayah Jatim, KKKS-KKKS," terangnya.

Nurwahidi mengungkapkan, produksi gas dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sejatinya bisa dimanfaatkan oleh industri yang ada di 2 provinsi tersebut. "Kalau kita lihat potensi saat ini kan untuk industri yang di Jateng itu kan ada Kendal ada Batang ya di kedepan itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur pada hari Kamis (9/11/2023).

Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi PTFI yang telah menyelesaikan lebih dari 80 persen pembangunan smelter per akhir Oktober, sesuai target linimasa kurvas dari pemerintah.

Dalam peninjauannya, Kartika Wirjoatmodjo sebagai perwakilan dari pemerintah menyampaikan proyek smelter PTFI sangat fundamental untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beberapa material utama untuk ekonomi Indonesia.

"PTFI salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar ke negara, dalam bentuk pajak, royalti. Kita ingin produksi Freeport baik di hulunya, maupun nanti di smelternya benar-benar bisa sesuai harapan, termasuk juga emas dan logam mulia lainnya", kata Kartika Wirjoatmodjo.

Untuk diketahui, Presiden RI Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021) lalu. Dia

penyebutkan, pabrik pemurnian dan pengolahan tambang mineral ini memiliki kapasitas pengolahan emas hingga 6.000 ton per tahun.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan smelter tersebut diperkirakan menelan dana USD 3 Miliar atau senilai Rp 42 Triliun. Kedepannya, selain berkapasitas pemurnian lumpur anoda untuk menjadi emas, mencapai 6.000 ton per tahun, juga bisa memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

"Kapasitas pengolahan konsentrat tembaga mencapai 1,7 juta ton per tahun dan ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Semoga pembangunan smelter ini bisa menjadi daya tarik industri lain untuk masuk di Jawa Timur," ungkap Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa smelter tersebut dibangun untuk menciptakan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Dia meminta supaya potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi nasional.

Menurutnya, pembangunan smelter di dalam negeri ini akan memperkuat hilirisasi industri, baik pada sektor swasta maupun BUMN agar komoditas tambangnya memiliki nilai lebih tinggi. Hilirisasi juga akan memberikan nilai tambah bagi negara yang juga berarti akan memberikan pemasukan yang lebih tinggi pada negara. Selain itu, juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membuat bangsa Indonesia makin mandiri dan makin maju.

Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal agar iklim investasi di Indonesia makin baik. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan makin diminati sebagai negara tujuan investasi. (lut/dya)

Pemkot Malang Bagikan 4.820 Bibit Cabai, Strategi Lain Kendalikan Inflasi



Jajaran Pemkot Malang secara simbolis melakukan penanaman bibit cabai rawit di Balai Benih Ikan Tlogowaru, Kedungkandang, Selasa (28/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membagikan sebanyak 4.820 bibit cabai rawit kepada 25 gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Selasa (28/11/2023). Langkah ini sejalan dengan upaya mengatasi kenaikan inflasi sebesar 0,8 persen pada Oktober 2023, terutama yang

disebabkan oleh naiknya harga cabai.

"Ini diserahkan kepada kelompok urban farming, kelompok tani, dan kelompok wanita tani. Tujuannya untuk mempermudah upaya penumbuhan dan pengembangan cabai rawit, agar memenuhi kebutuhan cabai di Kota Malang. Diharapkan juga bisa mengurangi

angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga cabai di Kota Malang," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, ditemui usai acara penyerahan bibit.

Slamet menambahkan, pihak Dispangtan Kota Malang akan berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara berkala. Guna memastikan efektivitas dan penggunaan yang tepat dari bibit cabai yang telah dibagikan dalam memerangi inflasi.

"Nanti kita monitoring, buat grup WA, anggotanya ya siapa-siapa yang sudah kita beri bantuan ini. Nanti kita lihat proses pertumbuhan bibit ini. Nanti dua minggu lagi dari BI juga akan menyalurkan bibit cabai sebanyak 5 ribu bibit, tapi itu akan bertahap, bukan hari ini. Kemudian bantuan pupuk organik cair berasal dari BUMD Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang, sebanyak 20 liter," urainya.

Terpisah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi,

menambahkan, setiap kelompok tani akan mendapat alokasi sebanyak 250 bibit cabai rawit.

Diah juga menyampaikan, pentingnya program ini dalam memberdayakan lahan masyarakat serta memastikan ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Ia juga menegaskan bahwa program ini mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang fokus pada upaya mengendalikan inflasi yang dipicu oleh komoditas pangan seperti cabai.

"Sehingga harapannya kalau permintaan cabai ini bisa dipenuhi sendiri di keluarga maka harga yang merangkak naik ini bisa dikendalikan, sehingga inflasi pangan bisa terkendali," tambahnya.

Menurut Diah, meskipun potensi panen cabai berkisar antara 1,5 hingga 2 bulan ke depan. Namun dikatakannya, fokus utama program ini adalah pada upaya edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan menanam cabai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga cabai di pasar lokal.

"Minimal kebutuhan cabai di rumahnya itu terpenuhi dengan dia menanam cabai sendiri. Gak perlu bingung karena cabai naik. Kemarin harga cabai di pasar Oro-oro Dowo masih naik, hari Jumat kemarin di harga Rp 95 ribu. Kalau hari ini Rp 90 ribu, itu di Pasar Mergan," tukasnya. (Santi/dya)

Realisasi PAD Kota Batu 22,2% di Bawah Target, Pj Wali Kota: Upayakan Jemput Bola

BATU - Per November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu masih mencapai 77,8 persen dari target yang ditetapkan. Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, meminta agar para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mengoptimalkan program-program salah satunya 'jemput bola'.

Pasalnya, Aries menyebutkan dari target PAD sebesar Rp 251,1 miliar, realisasi yang tercapai saat ini masih sebesar Rp 167,5 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kekurangan target PAD sebesar 22,2 persen atau sekitar Rp 83,6 miliar.

"Saya meminta kepada seluruh OPD untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Waktu efektif kita hanya sekitar satu bulan, jadi untuk mencapai target. Nanti bisa dengan melakukan upaya jemput bola," ujar Aries, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28/11/2023).

Aries menjelaskan, pendapatan tertinggi berasal dari sektor pajak



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. (Dok. Prokopim Kota Batu)

hotel yang terealisasi sebesar Rp 34,6 miliar atau mencapai 86,6 persen dari target Rp 39,9 miliar.

Disusul oleh sektor pajak restoran yang terealisasi sebesar Rp 27,4 miliar atau 84,4 persen dari target

Rp 32,5 miliar. Sementara sektor hiburan, sambungnya, tercatat angka realisasi sebesar Rp 31,6 miliar atau 78,2 persen dari target Rp 40,4 miliar.

Lebih lanjut, Aries juga mengaku pentingnya memfokuskan pada potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata Kota Batu. Menurutnya, sektor ini dapat memberikan kontribusi besar jika dimaksimalkan dengan baik. "Terlebih mendekati pergantian tahun Kota Batu dipastikan ramai kunjungan wisatawan," tambahnya.

Diakhir, dalam rangka memenuhi target PAD 2023, Aries kembali menegaskan perlunya OPD penghasil untuk menjalankan program-programnya secara maksimal.

"PAD yang maksimal nanti akan kembali untuk sarana dan prasarana publik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu," tukasnya. (Santi/dya)



SAMUEL WATTIMENA

dan Pagelaran Busana

DESAINER top Tanah Air Samuel Wattimena mengungkapkan pendapat bahwa fesyen show atau pagelaran busana bukan hanya konsumsi kalangan atas, namun boleh dinikmati oleh semua kalangan karena wastra Indonesia merupakan warisan untuk semua bagian Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan oleh sang perancang busana berusia 63 tahun tersebut kala menghadiri perhelatan Merah Putih Fashion Week (MPFW) yang diselenggarakan di Gedung Sarinah Jakarta Pusat, Sabtu malam. Ajang yang digagas oleh DPP Taruna Merah Putih tersebut menghadirkan koleksi padu padan wastra Indonesia karya sebelas desainer muda Tanah Air.

"Saya senang sekali bahwa Taruna Merah Putih menyelenggarakan acara MPFW karena fesyen milik seluruh warga. Kita saat ini menampilkan fesyen on the street, sehingga fesyen bukan hanya konsumsi kalangan atas. Fesyen untuk semua kalangan karena wastra Indonesia, wastra Nusantara, adalah warisan buat kita semua," kata Samuel Wattimena.

Dalam gelaran tersebut, Samuel Wattimena dan desainer kondang lainnya yaitu Dana Maulana didaulat sebagai mentor bagi sebanyak 11 desainer muda lewat sebuah workshop yang hasilnya kemudian ditampilkan pada gelaran MPWF malam itu.

Pagelaran busana ini menampilkan para model profesional dan model amatir yang merupakan pengurus dan anggota dari DPP Taruna Merah Putih yang mengenakan hampir 40 baju kreasi anak bangsa.

"Terima kasih untuk para desainer junior yang mau berpartisipasi karena acara ini adalah sarana, kesempatan, komunitas untuk bergabung," tambah Samuel.

Samuel juga kembali menegaskan bahwa setiap orang, tidak hanya desainer, harus memiliki rasa kebanggaan terhadap kain tradisional atau wastra Indonesia.

Kebanggaan itu, merupakan sumber daya yang tak pernah akan ada habisnya untuk terus digali sebagai sebuah inspirasi.

"Kita harus bangga dan memahami dari apa yang dimiliki oleh wastra di Indonesia. Ini merupakan inspirasi

yang tidak pernah ada habisnya. Jadi, wastra Indonesia adalah mata air untuk kita manfaatkan," papar Samuel.

Profil

Mengutip Wikipedia, Samuel Wattimena, kelahiran 25 November 1960 adalah seorang perancang busana berkebangsaan Indonesia pernah menggelar fashion show pada tahun 2011. Ia senang sekali mengangkat kain-kain tradisional Indonesia.

Namanya muncul setelah mengikuti ajang pencarian Perancang Mode yang digelar oleh Majalah Femina pada tahun 1979.

Karena menyadari Indonesia memiliki kekayaan kain yang sangat beragam, ia pun mempunyai mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat mode busana etnik yang bisa diperhitungkan di mata Internasional.

Pada tahun 2010, ia pernah menjadi konseptor Hari Pattimura yang diselenggarakan di Surabaya setiap 15 Mei. Ia juga pernah menjadi art designer untuk film Naga Bonar 2 yang dibintangi oleh Deddy Mizwar, Tora Sudiro, Darrius Sinatria dan Mike.

Sammy, begitu ia akrab disapa, pernah menggelar fashion show pada tahun 2011. Ia senang sekali mengangkat kain-kain tradisional Indonesia karena menurutnya Indonesia mempunyai berbagai macam kain yang bisa dibanggakan di kancah fashion Internasional. Hanya saja, masyarakat Indonesia tidak menyadari itu.

Tahun 2011 lalu, baru saja ia menggelar Pagelaran Tenun Unggan Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung di KOI Cafe & Gallery, Kemang, Jakarta Selatan.

"Saya senang sekali bahwa Taruna Merah Putih menyelenggarakan acara MPFW karena fesyen milik seluruh warga. Kita saat ini menampilkan fesyen on the street, sehingga fesyen bukan hanya konsumsi kalangan atas. Fesyen untuk semua kalangan karena wastra Indonesia, wastra Nusantara, adalah warisan buat kita semua,"

SAMUEL WATTIMENA



KESEHATAN MENTAL PERLU DIPERHATIKAN PADA BONUS DEMOGRAFI 2030

PSIKIATER sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi (PKJN RSMM) Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, mengatakan kesehatan mental perlu diperhatikan secara khusus apabila Indonesia akan mendapat bonus demografi mulai 2030.

"Indonesia akan segera mendapat bonus demografi, menyongsong generasi emas, namun, jika kesehatan mental tidak diperhatikan, ini akan membahayakan," kata Nova di Jakarta.

Berdasarkan prediksi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada kurun 2030-2040. Artinya, pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan usia nonproduktif.

BPS memperkirakan ada setidaknya ada sekitar 64 persen usia produktif dari total penduduk yang diproyeksikan, yakni 297 juta jiwa.

Kondisi itu merupakan keuntungan besar bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan produktivitas tinggi. Dalam istilah demografi, kondisi dengan populasi itu disebut piramida cembung.

Jika itu terjadi, maka produktivitas Indonesia akan mengalahkan negara Jepang yang pada masa depan penduduknya lebih banyak yang berusia tua.

Bila Indonesia ingin mendapatkan keuntungan demografis, maka tidak ada cara yang paling efektif, kecuali dengan meningkatkan jumlah para wirausahawan usia muda atau produktif tersebut.

Meski menguntungkan, Nova mengatakan Indonesia perlu untuk menjaga sumber daya manusia (SDM) yang didominasi para usia produktif termasuk generasi muda tersebut, salah satunya soal kasus kesehatan mental yang kian hari kian meningkat. Menurut dia, SDM dalam jumlah banyak bisa menjadi kekuatan, namun, juga bisa menjadi ancaman jika tidak teratur dengan baik.

Selain lingkungan sosial, lanjut Nova, hal-hal yang mungkin tidak disadari seperti perubahan iklim, hingga kondisi peperangan yang terjadi di dunia terbukti dapat menyebabkan kecemasan hingga gangguan mental serius pada seseorang, sebagaimana yang juga telah dikatakan organisasi kesehatan dunia WHO.

"Hal ini yang membuat WHO sampai membuat komisi khusus yang ditugaskan meneliti dan mengatasi hal ini tiga tahun ke depan.

Sedangkan Jepang sudah lebih dulu dari WHO, di mana mereka membuat Menteri Kesepian saat pandemi kemarin," Nova menjelaskan.

Kesehatan mental anak muda

Nova juga menemukan bahwa ekspektasi eksternal menjadi pemicu maraknya kasus kesehatan mental generasi muda.

"Ketika saya meneliti stressor (pemicu) psikososial di DKI Jakarta, mereka merasa bahwa prestasi mereka tidak sesuai dengan ekspektasi. Masalahnya ekspektasi siapa? Kebanyakan dikte eksternal," katanya.

Ekspektasi eksternal atau tuntutan sosial tersebut membangun sebuah standar semu akan sebuah keberhasilan seseorang. Media sosial juga berperan besar dalam kasus tersebut.

Dikte eksternal yang tersebar di media sosial saat ini, jelas Nova, membuat generasi muda berjarak dengan dirinya sendiri, dan tanpa sadar lupa untuk memiliki mimpi yang benar-benar diinginkan.

Nova melakukan

penelitian tersebut pada generasi Z di DKI Jakarta, yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012 (menurut laman Kementerian Keuangan RI).

Merujuk pada data American Psychological Association, gen Z merupakan kelompok masyarakat yang paling mau mengakui bahwa mereka memiliki masalah dengan kesehatan jiwa.

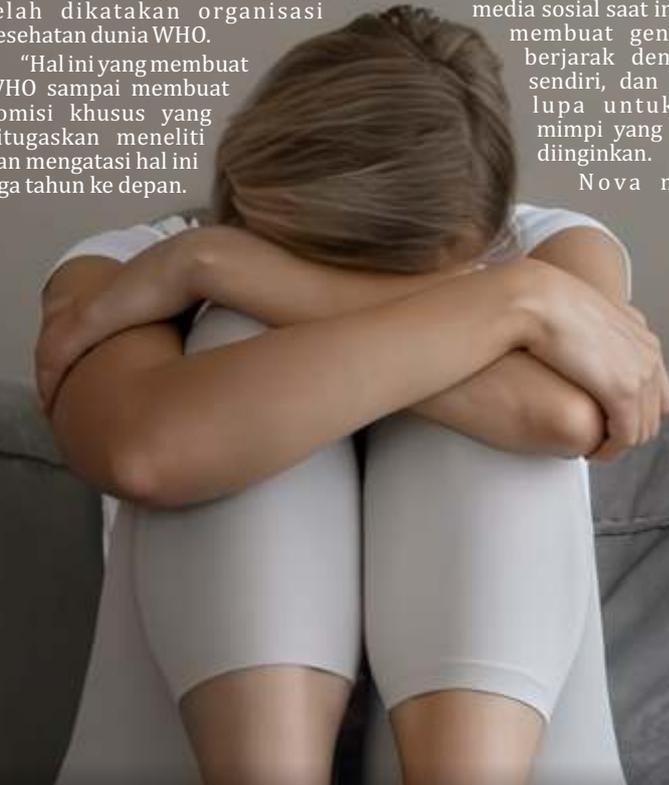
Nova menjelaskan, bahwa gen Z juga merupakan generasi paling rajin untuk mencari bantuan dan sangat peduli tentang kesehatan mental dan kehidupan secara keseluruhan, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.

Meski gen Z dinyatakan lebih terbuka soal isu kesehatan mental dan lebih rajin untuk mencari pertolongan, angka kasus bunuh diri di kalangan gen Z justru meningkat drastis dalam empat tahun terakhir.

Di Jakarta, penelitian tahun 2019 terhadap 910 remaja usia 14 sampai 19 tahun menyatakan 13,8 persen berisiko bunuh diri di kemudian hari.

Sementara baru-baru ini di tahun 2023, Nova mengatakan angka risiko tersebut telah naik di atas 50 persen. Penelitian kedua ini dilakukan terhadap 612 mahasiswa di Jakarta.

"Ide untuk bunuh diri lebih banyak dialami pada perempuan, namun pada saat eksekusi atau benar-benar melakukan mayoritas jenis kelamin laki-laki," jelas Nova (Ant)



"Indonesia akan segera mendapat bonus demografi, menyongsong generasi emas, namun, jika kesehatan mental tidak diperhatikan, ini akan membahayakan,"

Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ

Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi (PKJN RSMM)

PEMANFAATAN AI INKLUSIF DAN NON DISKRIMINATIF



WAKIL Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menekankan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) harus dijalankan dengan transparan, inklusif dan non diskriminatif.

"AI itu harus bersifat inklusif dan non diskriminatif juga. Lalu harus transparan terutama untuk generatif AI," ucap dia dalam siaran pers.

Hal itu dikatakannya dalam acara Next Level AI Conference di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/11).

Menurut Wamenkominfo, prinsip itu memiliki arti penting karena perkembangan teknologi AI memiliki banyak manfaat di berbagai sektor kehidupan. Nezar mencontohkan banyak beredar video yang dibuat dengan teknologi AI bahkan deepfake.

"Kita berharap developer aplikasi ini bisa memberikan watermark bahwa gambar yang ditampilkan adalah hasil generatif AI. Ini penting supaya publik tidak tersesat dan tidak punya impresi salah terhadap produk AI yang mereka konsumsi," kata dia.

Oleh karena itu, Nezar menilai Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memitigasi segala risiko yang akan terjadi.

Salah satu upaya untuk meminimalkan risiko tersebut dengan Surat Edaran Menkominfo mengenai Pedoman Etika Penggunaan AI. Pedoman ini akan menjadi norma dasar bagi para pengembang dan pengguna AI.

"Mengingat AI lebih banyak menggunakan data, maka SE dihadirkan sebagai panduan agar setiap developer yang menggunakan AI bisa menjalankannya secara transparan. Melalui SE tersebut, Indonesia memiliki framework etik sebelum berangkat kepada regulasi yang lebih komprehensif," tuturnya.

Kementerian Kominfo akan terus memantau perkembangan inovasi di bidang AI. Pada saat bersamaan, akan menyelaraskan dengan regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Nanti akan ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Termasuk UU ITE yang direvisi. Nanti kalau sudah ditetapkan akan menjadi pendukung ekosistem regulasi emerging technologies seperti AI ini bisa kita atur," ucap dia.

Tidak hambat inovasi

Nezar menyampaikan bahwa Kementerian tidak berencana membuat aturan terkait artificial intelligence (AI) kecerdasan buatan yang terlalu ketat agar tidak menghambat inovasi.

Kementerian Kominfo tengah menyusun surat edaran terkait panduan penggunaan AI. Panduan itu akan mengatur norma-norma bagi pengembang, pengguna, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan teknologi AI.

Lebih berfokus pada nilai-nilai dalam penggunaan AI, seperti transparansi, inklusivitas, dan nondiskriminatif.

Dalam hal transparansi, Nezar mencontohkan bahwa apabila terdapat program atau aplikasi yang menggunakan teknologi AI generatif untuk menghasilkan sebuah produk seperti foto, gambar atau video, maka produk tersebut harus diberikan semacam label atau tanda air.

"Untuk menghindari kecacauan informasi misalnya dengan memberikan watermarking (tanda air) atau label di situ bahwa produk yang ditampilkan di media sosial itu adalah hasil karya artificial intelligence. Dengan demikian publik tahu bahwa karakter yang ada di dalam satu video misalnya itu adalah hasil penggunaan AI," ujar Nezar.

Nezar mengungkapkan bahwa proses penyusunan panduan itu telah

berlangsung selama hampir setahun, melibatkan banyak diskusi dan penyerapan pandangan dari berbagai pihak. Dia berharap surat edaran terkait panduan penggunaan AI sudah bisa rampung pada awal bulan depan (Ant)



Mengingat AI lebih banyak menggunakan data, maka SE dihadirkan sebagai panduan agar setiap developer yang menggunakan AI bisa menjalankannya secara transparan. Melalui SE tersebut, Indonesia memiliki framework etik sebelum berangkat kepada regulasi yang lebih komprehensif,"

NEZAR PATRIA

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

TIPS BILA

MENJADI CAREGIVER

“

Menjadi ‘caregiver’ bukan lah hal yang mudah, namun, masa-masa sulit ini tentu tidak akan berjalan selamanya, memberikan yang terbaik adalah satu-satunya cara,”

PUTRI dari Indro Warkop Hada Kusumonegoro membagikan pengalamannya sekaligus tips untuk menjadi orang yang merawat anggota keluarga sedang sakit atau “caregiver”.

Hada menjadi peran penting di keluarga saat mendiagnos ibunda, Nita, didiagnosis mengidap kanker paru pada 10 Agustus 2017 silam.

“Menjadi ‘caregiver’ bukan lah hal yang mudah, namun, masa-masa sulit ini tentu tidak akan berjalan selamanya, memberikan yang terbaik adalah satu-satunya cara,” kata Hada kepada ANTARA, saat ditemui di Jakarta.

“Caregiver” adalah tenaga profesional untuk melakukan pendampingan pada seseorang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan karena keterbatasan fisik maupun mental. Namun, kini maknanya telah bergeser dan sering disematkan bagi anggota keluarga atau orang dekat yang sedang merawat anggota keluarga lain.

Seperti yang dikatakan Hada, tentu tidak mudah untuk menjadi seorang “caregiver”. Merawat orang tercinta sering kali dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, dan keseimbangan hidup secara keseluruhan.

Hal ini dapat menyebabkan stres, kemarahan, kecemasan, hingga kelelahan fisik dan mental yang mendalam. Seseorang yang sedang merawat orang sakit sering kali merasa terputus dari dunia luar.

Begitu banyak waktu dan energi

yang dihabiskan untuk merawat orang lain, bahkan, sering kali tidak memiliki waktu untuk merawat diri mereka sendiri.

Hal ini yang juga dirasakan betul oleh Hada. Untuk menjadi “caregiver” seseorang perlu mampu berbesar hati untuk mengesampingkan kebutuhannya terlebih dahulu. Menghindari menangis di depan orang yang sedang butuh dukungan.

Menyiapkan fisik dan mental yang kuat adalah hal utama yang harus dilakukan untuk menjadi “caregiver”.

Meski begitu, bukan berarti “caregiver” tidak boleh memiliki waktu untuk diri sendiri. Hada menyebut, meski singkat, sempatkan diri untuk menumpahkan segala perasaan yang dirasakan, walau itu tidak dilihat oleh orang yang sedang sakit atau orang lain.

“Aku memberikan waktu untuk diriku menangis, di hari mami didiagnosis kanker, dan saat pemakaman aku menangis sekencang-kencangnya, tapi setelahnya aku masih menjadi orang yang harus menjaga orang lain, menjaga hatinya papa,” kata Hada.

“Nikmati rasa sakitnya, nikmati dukanya, lama-kelamaan akan terbiasa dan bisa menjalani hidup kembali,” tambahnya.

ANTARA CAREGIVER DAN PERAWAT

Siti Rusmiati selaku Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Surya Farma Husada, Kediri, Jawa Timur mengungkapkan perbedaan antara caregiver dan perawat agar tidak tertukar.

1. Tempat bekerja

Caregiver dan perawat sama-sama berada di bidang kesehatan dan juga bertugas merawat pasien. Akan tetapi, perawat memiliki peran yang lebih besar di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Sementara itu, caregiver bekerja lebih fleksibel karena dapat bekerja di rumah pasien secara langsung. Caregiver pun seringkali mengantar pasien ke rumah sakit sebatas untuk mengecek kondisi pasien.

2. Tanggung jawab

Dalam merawat pasien, perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perawatan medis. Cukup berbeda dengan caregiver, yang memiliki tanggung jawab kepada satu pasien saja secara khusus.

3. Tempat menimba ilmu

Tentunya kamu sudah mengetahui bahwa perawat biasanya memiliki pengetahuan medis yang lebih luas dan kompleks. Menjadi caregiver, kamu tidak membutuhkan waktu lama karena kamu bisa mengikuti pelatihan di LKP dalam waktu kurang lebih 2—3 bulan. Cukup dengan latar pendidikan SMA/SMK lalu bisa langsung bekerja sambil kuliah kelas jauh sehingga bisa menabung untuk modal usaha.

Itulah 3 (tiga) perbedaan antara caregiver dan perawat. Keduanya sama-sama berada di pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kesehatan. Keduanya pun saling melengkapi dalam memberikan perawatan kepada pasien yang membutuhkan (Ant)

Menanti 'Jumat ... (dari Hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK serta Polda Metro Jaya telah menjalin koordinasi untuk agenda pemeriksaan mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo alias SYL serta dua anak buahnya, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta besok, Rabu (29/11/2023). Ketiganya akan dimintai keterangan oleh kepolisian terkait kasus dugaan pemerasan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.

"Terkait besok ada pemeriksaan SYL, Hatta, dan Kasdi sudah ada koordinasi karena yang tiga orang ini kan statusnya ditahan di sini. Jadi setiap pihak Polda Metro Jaya sudah memeriksa tentunya berkoordinasi," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Asep mengaku dirinya sudah dihubungi secara pribadi oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri mengenai agenda pemeriksaan besok. Kepolisian juga sudah mengirim surat resmi kepada KPK. "Nanti dari sini kita akan bawa ke sana, diminta keterangan di sana, dan itu sudah berjalan beberapa kali, mungkin ini yang kedua atau ketiga," ungkap Asep.

Diketahui, SYL bakal diperiksa di Bareskrim Polri, Rabu (29/11/2023) besok. Pengacara SYL Djamiludin Koedoeboen mengatakan, kliennya bakal diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret eks Ketua KPK, Firli Bahuri (FB).

Ia menambahkan, agenda pemeriksaan besok hanya meminta keterangan tambahan SYL. "Pemeriksaan tambahan saja, terkait dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh FB," katanya.

Selanjutnya, pada Jumat (1/12/2023) polisi bakal memeriksa eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Firli akan diperiksa di Gedung Bareskrim, Mabes Polri.

"FB (Firli) akan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka pada hari Jumat, 1 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di Gedung Bareskrim, Mabes Polri," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Selasa (28/11/2023).

Trunoyudo berujar, polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan Firli pada Selasa pagi. Namun, dia belum bisa memastikan apakah Firli akan hadir atau tidak. "Kami melayangkan surat panggilan terhadap Firli pada pagi ini," ujar dia.

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, belum memberikan respons saat ditanya apakah kliennya akan hadir dalam pemeriksaan ini. Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Firli kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka. PN Jaksel

menetapkan sidang perdana gugatan praperadilan Firli pada 11 Desember 2023.

Di sisi lain, KPK sepakat tidak memberi bantuan hukum terhadap Komisioner KPK nonaktif Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan dan pejabat struktural terkait yang digelar Selasa (28/11/2023) siang.

Ali menerangkan kesepakatan itu diambil dalam rapat karena menilai kasus yang menjerat Firli tidak menyangkut tugas dan wewenang sebagai insan KPK. Dia menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. "Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," ujar Ali setelah konferensi pers pengumuman kasus dugaan suap di Bandung, Gedung Merah Putih KPK, Selasa (28/11/2023) malam.

"Rapat pimpinan membahasnya dan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan," sambung dia.

Ali mengatakan keputusan tidak memberi bantuan hukum terhadap Firli diambil berdasarkan rapat pimpinan bersama pejabat struktural dalam hal ini Biro Hukum KPK pada hari ini, Selasa (28/11/2023). "Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya," kata pria berlatar belakang jaksa tersebut.

Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Permohonan ditolak lantaran keduanya berstatus sebagai tersangka kasus rasuah dan tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan tertulis.

Untuk diketahui, saksi dan korban suatu tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK. Perlindungan tersebut berupa keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

"Saksi dan korban juga berhak: ikut serta dalam proses memilih dan

menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan," bunyi aturan tersebut.

Selain itu, saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, dan mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

Bahkan, saksi dan korban juga berhak dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, hingga mendapat pendampingan.

Polisi Hadapi Praperadilan

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini, Polda Metro Jaya pasti dapat menghadapi proses praperadilan dengan persiapan yang matang dan profesional. "Sebenarnya tidak ada soal kalau yang bersangkutan mengajukan praperadilan, itu kan hak. Tapi jika mengikuti proses yang ada, saya yakin Polda Metro Jaya pasti siap menghadapi tahapan tersebut. Proses penetapan tersangkanya tidak ada yang cacat kok, semuanya clear, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Polisi tidak mungkin asal-asalan," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Politikus NasDem ini melihat, kasus tersebut nantinya akan terus bergulir hingga di meja persidangan. Sebab dirinya meyakini pihak kepolisian tidak mungkin memproses suatu temuan tanpa adanya dasar hukum dan bukti yang kuat.

"Karenanya, ini proses yang biasa saja, tidak gimana-gimana. Karena memang tidak ada yang salah selama prosesnya. Ada laporan (pemerasan) masuk, diusut, kedatangan bukti-buktinya, ya diproses dong. Begitu saja kan sebenarnya. Jadi, mari kita tunggu hasil praperadilannya nanti," ungkap Sahroni.

Terakhir, Sahroni pun turut meminta masyarakat untuk terus memantau dan mengawal jalannya kasus ini hingga usai nanti. Bahkan dia ingin masyarakat langsung bereaksi cepat jika menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama prosesnya. "Masyarakat juga tolong bantu pantau dan kawal kasus ini hingga usai nanti. Jadi kalau ada yang janggal-janggal, sudah pasti 100% ketahuan. Masyarakat kita cerdas-cerdas, kok," kata Sahroni.

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah Castro, menyarankan Polda Metro Jaya agar lebih galak dan berani untuk segera menahan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan. "Terlebih Polda Metro Jaya agak lambat dalam kasus ini. Bahkan Firli sendiri belum ditangkap dan ditahan," katanya.

Semakin lama Firli dibiarkan berkeliaran, menurut dia, semakin

banyak drama. "Harusnya Polda Metro Jaya lebih galak, jangan membuka ruang kompromi," katanya.

Castro menilai Polda Metro Jaya seharusnya lebih terbuka kepada publik terkait sejumlah saksi dan peran-peran mereka dalam perkara ini. "Minimal menyampaikan inisial dan apa peran saksi dalam perkara ini," katanya.

Castro mengatakan, jika Polda Metro Jaya tidak transparan akan memungkinkan terbukanya ruang tawar-menawar. "Sebab proses yang tertutup memungkinkan terbukanya ruang tawar-menawar. Kan ini yang dikhawatirkan publik," katanya. (wid,rls,kum,tmp/dya)

JEJAK TERSANGKA FIRLI BAHURI

DIJERAT BERBAGAI PASAL
Firli menjadi tersangka dengan jeratan pasal berlapis, yakni
- Pasal 12e, Pasal 12B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ANCAMAN HUKUMAN
Pidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

BERBAGAI BUKTI YANG DIMILIKI POLISI
- Pernyataan 91 saksi antara lain anak buah Firli dan Syahrul Yasin Limpo, serta tujuh orang ahli.
- Hasil penggeledahan dua rumah Firli di Jakarta Selatan dan Bekasi yang merupakan dokumen dan barang elektronik, pecahan nukanerana valas dari beberapa money changer atas mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan jumlah terkonversi Rp 7.468.711.500 sejak Februari 2021 sampai September 2023.

DIBERHENTIKAN SEMENTARA
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan Firli akan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Ketua KPK. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang tentang KPK. Alex juga mengatakan pemberhentian sementara itu ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

TIMELINE KASUS FIRLI

- 1 Juni 2023**
Penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dimulai. KPK memanggil Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk diperiksa. KPK juga menggeledah rumah dinas SYL.
- 12 Agustus 2023**
Polda mendapatkan laporan masyarakat mengenai pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK.
- 21 Agustus 2023**
Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk dugaan kasus korupsi Firli.
- 5 Oktober 2023**
Enam orang sudah diperiksa terkait kasus tersebut termasuk Syahrul Yasin Limpo, sopir, dan ajudan Firli.
- 6 Oktober 2023**
Foto Firli dan SYL bertemu di GOR Tangki Mangga Besar menjadi viral di media sosial. Firli klaim pertemuan itu terjadi sebelum kasus korupsi di Kementan diurus oleh KPK.
- 9 Oktober 2023**
Polda menaikkan status perkara dugaan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
- 11-13 Oktober 2023**
Polda memeriksa Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar dan ajudan Firli, Kevin Egananta Joshua. Dua orang itu terlibat dalam mengatur pertemuan antara SYL dan Firli, juga dalam penyerahan uang untuk Firli pada Juni 2022.
- 24 Oktober 2023**
Polda Metro Jaya memeriksa Firli Bahuri. Ketua KPK itu sempat mengubah tanggal pemeriksaan dengan alasan sedang bertugas.
- 26 Oktober 2023**
Polda menggeledah dua rumah Firli di Jakarta dan Bekasi dan menemukan berbagai barang bukti.
- 13 November 2023**
Firli kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya.

Kampanye Baru Dimulai, Sudah 943 Konten Hoaks Diidentifikasi

JAKARTA - KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu serta Pilpres mulai Selasa (28/11/2023) hingga 10 Februari 2024. Bawaslu pun berupaya untuk meminimalisir dan mencegah hoaks selama Pemilu 2024 dengan meluncurkan tiga saluran aduan. Yaitu melalui layanan telepon, email, dan juga posko aduan masyarakat yang ada di kantor pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

Meski kampanye baru dimulai, namun hoaks terkait politik ternyata sudah masif menyebar sejak awal tahun. Menurut temuan, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) ada 934 hoaks terkait Pemilu 2024 pada periode Januari-September 2023. Angka inipun diprediksi akan meningkat drastis mengingat kampanye politik baru dimulai.

Ketua Komite Media Sosial Mafindo Silma Agbas mengatakan pada periode 1-15 November saja, sudah ditemukan sekitar 49 hoaks terkait politik, walaupun hoaks terkait Palestina dan Israel masih mendominasi. Namun, berkaca dari kampanye 2019, ada 133 hoaks yang ditemukan terkait pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dan 93 hoaks terkait Prabowo dan Sandiaga Uno.

"Makanya kita dari Mafindo berharap sekali masyarakat aware tentang preventing ini, jadi mereka ilmunya edukasi soal pemilu juga dapat, jadi ketika kampanye start ari ini, mereka sudah aware terhadap hoaks-hoaks yang masuk," ujar Silma pada paparannya di Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Silma mengatakan saat ini hoaks yang ditemukan bukan hanya terkait pasangan calon, melainkan juga tentang pelaksanaan pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, hoaks yang ditemukan kebanyakan berupa video dengan teks. Menurut data dari Mafindo, dari 49 konten hoaks pada bulan November, 12 konten di antaranya membahas terkait kandidat ataupun potensi kandidat, 1 konten terkait TNI, 3 konten terkait pemerintah pusat, 2 konten terkait kandidat ataupun kandidat potensial dan kategori lainnya, serta 1 konten terkait pemerintah pusat dan kategori lainnya.

"Hoaks tentang kandidat kebanyakan tentang pencalonan dan dukungan politik, tetapi ada beberapa hoaks yang menyerang kandidat dengan isu SARA, kriminalitas, kecurangan pemilu, atau karakter/gaya hidup negatif," tulis laporan tersebut.

Terbanyak Beredar di Facebook

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak 17 Juli hingga 26 November 2023 telah menemukan sebanyak 96 isu hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tersebar di berbagai medium di ruang digital Indonesia menjelang



Petugas membawa bendera 18 partai peserta pemilu 2024 dalam Kirab Pemilu yang digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). (dok.ist)

pelaksanaan kampanye.

"Sejak 17 Juli sampai 26 November 2023, Kementerian Kominfo telah menemukan 96 isu hoaks Pemilu yang tersebar dalam 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down sebanyak 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Secara lebih rinci, temuan isu hoaks dengan topik Pemilu pada Juli terdapat sebanyak enam temuan, lalu pada Agustus ditemukan 18 hoaks, September terdapat 13 kasus, dan jumlahnya mulai meningkat signifikan mulai Oktober dengan 20 temuan, serta November ada 39 kabar palsu.

Dari sebaran jumlah konten, konten hoaks tentang Pemilu itu paling banyak berada di media sosial Facebook dengan total 312 konten, sebanyak 274 konten telah diputus aksesnya dan 38 konten sedang ditindaklanjuti.

Selanjutnya konten-konten hoaks mengenai Pemilu juga ditemukan di TikTok, YouTube, Twitter (X), dan Snack Video. Untuk TikTok ditemukan sebanyak 21 konten, YouTube 17 konten, X terdapat tiga konten, dan Snack Video ada dua konten.

Sebanyak empat konten telah diputus aksesnya di TikTok sementara 17 konten sisanya tengah ditindaklanjuti, lalu untuk YouTube telah memutus sebanyak 10 konten dengan 7 konten masih ditindaklanjuti.

Berikutnya untuk X telah memutus akses ke satu konten hoaks dan masih menindaklanjuti dua konten, dan Snack Video ada satu konten telah diputus dan satu konten lainnya masih dianalisis.

Budi mengatakan kerja sama dengan para pihak platform media sosial telah dijalin dan diperkuat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 agar ruang digital Indonesia bisa bebas dari konten-konten bermuatan negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Setiap media sosial pun telah memiliki kampanye yang diharapkan dapat memperkuat pesan kampanye Kementerian Kominfo untuk Pemilu yaitu Pemilu Damai 2024. "Semua platform sosial media itu sudah bekerja sama dan berkomunikasi baik dengan kami. Mulai dari Meta, Google, TikTok itu mereka semua punya komitmen yang sama untuk bersamasama menjaga platform mereka dengan narasi-narasi pemilu damai," kata Budi.

Budi juga mengajak masyarakat apabila menemukan informasi yang kebenarannya tidak meyakinkan terkait Pemilu 2024 agar bisa melaporkan ke platform digital atau secara langsung ke Kementerian Kominfo.

Harapannya dengan demikian pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut tetap menjaga semangat demokrasi yang sehat dan menyelamatkan masa depan bangsa. Ia pun mengajak masyarakat untuk berbagi konten yang positif saat mengesus pilihannya dan tidak menjelek-jelekan kontestan lainnya.

"Jadi bijak bersuara, bijak bermain media sosial, supaya dapat menjaga Pemilu di 2024 ini menjadi sejuk dan damai. Lalu kalau mau menunjukkan dukungan jangan buat konten yang menjelek-jelekan tapi tampilkan hal positif dari yang didukung. Jangan sampai merendahkan martabat orang lain," begitu pesan Menteri Budi. (wid,rls,ist,ant/dya)



JADWAL LENGKAP KAMPANYE PEMILU 2024:



**28 NOVEMBER 2023 -
10 FEBRUARI 2024**

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial



**21 JANUARI 2024 -
10 FEBRUARI 2024**

Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring



**11 FEBRUARI 2024 -
13 FEBRUARI 2024**

Masa tenang



14 Februari 2024

Pemungutan suara serentak Pemilu



**2 Juni 2024 -
22 Juni 2024**

Kampanye tambahan jika terjadi Pilpres putaran kedua



**23 Juni 2024 -
25 Juni 2024**

Masa tenang.



FASILITAS NEGARA DILARANG BUAT KAMPANYE

SARANA MOBILITAS

- Meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
- Fasilitas pengamanan pejabat tetap melekat.

GEDUNG KANTOR

- Rumah dinas, rumah jabatan, kecuali daerah terpencil dan harus memperhatikan prinsip keadilan.
- Jika disewakan untuk umum berarti boleh dipakai.

SARANA PERKANTORAN

- Radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan peralatan lainnya.
- Jika disewakan untuk umum berarti boleh dipakai.

FASILITAS LAIN

- Fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau APBD.

Sumber: UU Pemilu, PKPU

